

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BUMDES DESA KARANGLEWAS KIDUL

Rizqy Tirta Hidayatullah^{1*}, Siti Maghfiroh², Adi Wiratno³

^{1*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, rizqytirta999@gmail.com, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, firoh.sutanto@gmail.com, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, adiwiratno1965@gmail.com, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana optimalisasi dana desa yang diperuntukkan bagi BUMDes Mitra Rejo Makmur agar BUMDes tersebut dapat optimal dan meningkatkan daya saing BUMDes di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian ini yaitu dana desa yang dianggarkan untuk BUMDes belum optimal dan BUMDesnya tidak memiliki daya saing karena kurangnya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak seperti dari masyarakat, maupun pemerintah desa. Namun, dalam hal pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Karanglewas Kidul sudah optimal dan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun keterlibatan masyarakat desa masih kurang dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa BUMDes Mitra Rejo Makmur belum optimal dan tidak memiliki daya saing.

Kata Kunci: Dana Desa, BUMDes, Optimalisasi, Daya Saing

Abstract

This study aims to examine how to optimize village funds allocated for BUMDes Mitra Rejo Makmur so that BUMDes can be optimal and increase the competitiveness of BUMDes in Karanglewas Kidul Village, Karanglewas District, Banyumas Regency. The research method used is using a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data collection obtained from interviews, direct observation, and documents. The results of this study are that the village funds budgeted for BUMDes are not optimal and the BUMDes do not have competitiveness due to lack of participation and support from various parties such as from the community, as well as the village government. However, in terms of managing village funds by the Karanglewas Kidul Village Government, it is optimal and in accordance with the standards and procedures set by the government, although village community involvement is still lacking in determining priorities for the use of village funds. This is one of the reasons why BUMDes Mitra Rejo Makmur not optimal and does not have competitiveness.

Keywords: Village Fund, BUMDes, Optimization, Competitiveness

1. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan yang sangat luas, termasuk juga wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan di Indonesia dari tahun 2015-2021 semakin meningkat menurut *website* data BPS Indonesia. Tahun 2021 jumlah perdesaan yang tercatat pada *website* BPS yaitu sebanyak 83.843 desa. Dengan adanya data perdesaan tersebut dari Badan Pusat Statistik, maka ini dapat memudahkan pemerintah pusat untuk membantunya dalam mencapai cita-cita nasional yang sudah tertuang pada sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan mengalokasikan dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan desa demi kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 pagu dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan sumber dari <http://sipede.ppmd.kemendes.go.id> jumlah pagu dana desa yang diberikan pada tahun 2015 sebanyak 20,76 triliun rupiah dengan realisasi sebanyak 20,76 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 pagu dana desa yang diberikan yaitu sebanyak 72 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh untuk memajukan perdesaan dan masyarakat desa. Banyak sarana dan prasarana yang dibangun dari anggaran dana desa seperti jalan desa, pasar desa, BUMDes, air bersih, dan lain sebagainya. Namun, besarnya anggaran dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa haruslah tetap diawasi agar tetap optimal dan sesuai peruntukannya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kasus tindakan penyelewengan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan desa. Seperti yang dimuat dalam *website* merdeka.com kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Serang pada tahun 2016 yang telah merugikan negara mencapai 531 juta rupiah. Contoh lainnya yaitu korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Cirebon yang merugikan negara sebesar 354 juta rupiah. Selain itu, Polda Sumatera Selatan selama tahun 2017 dan 2018 mencatat ada sembilan kasus penyelewengan dana desa. Adanya beberapa kasus tersebut yang menyebabkan keluhan dari masyarakat desa karena dana desa yang dianggarkan seringkali tidak tepat sasaran, sehingga anggaran dana desa seringkali dapat dinyatakan tidak optimal dalam peruntukannya.

Anggaran dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah telah memberikan *output* dan *outcome* untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satunya yaitu berdirinya badan usaha milik desa atau BUMDes. Pemerintah juga mendukung berdirinya BUMDes sebagai salah satu langkah dan upaya untuk pemulihan ekonomi nasional pada saat pandemi Covid-19. BUMDes telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, BUMDes juga sejalan dengan visi misi Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang tertuang dalam sembilan Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas (Putra, 2015). Salah satu sumber permodalan BUMDes yaitu berasal dari anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa sebagai pengelola dana desa kepada pengelola BUMDes. Adapun besarnya disesuaikan pada keputusan masing-masing pada tiap-tiap desanya. Namun, pada praktiknya masih banyak kendala yang dialami oleh BUMDes, seperti adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar BUMDes terdampak pandemi hingga gulung tikar, kurangnya pengelolaan dan konsep perencanaan bisnis yang matang, kurangnya sinergisitas antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan daya saing BUMDes menurun atau bahkan tidak memiliki daya saing.

Perdesaan di Kabupaten Banyumas juga mendapat dana desa dan sebagian besar desa-desanya sudah memiliki BUMDes. Bupati Kabupaten Banyumas, Ir. Achmad Husein menyatakan bahwa setelah terbitnya UU tentang Desa, banyak hasil pada 103 desa dan selalu meningkat di tiap tahunnya. Selain itu, menurutnya dengan adanya dana desa di Kabupaten Banyumas juga mempercepat penanganan dan membantu masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Namun, di Kabupaten Banyumas juga terdapat penyelewengan anggaran dana desa. Sebagai contohnya yaitu penyelewengan yang terjadi di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo yang mana kepala desa dan bendahara desa di Desa Tipar tersebut melakukan penyimpangan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp335.911.249,- pada tahun 2014 hingga tahun 2016.

Kabupaten Banyumas memiliki banyak desa, salah satunya yaitu Desa Karanglewas Kidul. Pagu dana desa di Desa Karanglewas Kidul rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sudah menerima dana desa sejak tahun 2015. Pada tahun 2022 jumlah pagu dana desa yang diterima yaitu sebesar Rp1.263.153.000,-. Jumlah tersebut tergolong besar untuk melakukan peningkatan pembangunan dan pelayanan desa. Salah satu peruntukkan pagu dana desa tersebut adalah untuk pengembangan BUMDes. Pemerintah Desa Karanglewas Kidul diketahui menganggarkan dana desa untuk BUMDesnya sejak tahun 2020 hingga sekarang (2022). Besaran yang sudah diterima oleh BUMDes Mitra Rejo Makmur yaitu pada tahun 2020 dan 2021 dengan total sebesar Rp175.000.000,- dan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,- tetapi belum menerima anggaran tersebut (per Juni 2022) karena menunggu pencairan tahap selanjutnya. Meskipun sudah menerima anggaran dana desa, unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mitra Rejo Makmur belum berjalan hingga sekarang (per Juli 2022).

Penelitian ini berfokus di Desa Karanglewas Kidul untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan dana desa di desa tersebut untuk meningkatkan daya saing BUMDesnya, yaitu BUMDes Mitra Rejo Makmur. Hingga saat ini (per Juli 2022) BUMDes Mitra Rejo Makmur sudah mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah desa, namun belum berjalan unit usahanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan dana desa di Desa Karanglewas Kidul untuk meningkatkan daya saing BUMDesnya serta menganalisis mengapa unit usahanya belum berjalan hingga saat ini. Adapun sebagai perbandingan daya saingnya yaitu pada BUMDes Desa Srowot, sebagai BUMDes yang pengelolaannya sudah bagus (Mahadika, 2021).

2. Studi Pustaka

2.1 Teori Pendukung

NPM atau *New Public Management* adalah teori yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik. Pada awalnya, perspektif NPM ada di Amerika Serikat karena sejumlah krisis dan sejak saat itu NPM dikenal secara global, termasuk oleh negara-negara berkembang. Menurut Rainey (1990) tujuan *New Public Management* yaitu “*public management aims to achieve skills and improve skills and improve accountability.*” Menurut Graham & Hays (1991) menyatakan bahwa tujuan NPM yaitu “*public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement and dozen of other managerial and technical question.*” Dari beberapa pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari *New Public Management* (NPM) yaitu ditujukan agar sektor publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektif, mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan mampu menangani berbagai persoalan manajerial dan pertanyaan teknis. Adapun

dana desa dan BUMDes yang berkaitan dengan sektor publik karena berhubungan langsung dengan publik seperti pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat.

Teori agensi terbentuk karena sering digunakan dalam penelitian-penelitian yang beraliran positivistik. Adapun penelitian yang melandasi terbentuknya teori agensi yaitu penelitian yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* yang dilakukan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling tahun 1976. Untuk mengembangkan teori struktur kepemilikan perusahaan, maka penelitian ini mengintegrasikan dari beberapa unsur dari teori agensi, teori hak kepemilikan, dan teori keuangan. Adapun asumsi dari teori agensi yaitu bahwa pihak pemilik modal (prinsipal) dan pihak pengelola (agen) adalah dua pihak yang memiliki kepentingan masing-masing dan secara rasional memaksimalkan kepentingannya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Dari asumsi tersebut maka dibentuklah perusahaan yang terdiri dari kumpulan kontrak (*nexus of contract*), sehingga muncul masalah agensi (*agency problem*) yang meliputi masalah *agency cost* dan pemantauan oleh prinsipal. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak agen agar meminimalisir bentuk *agency problem*.

Namun, dalam prakteknya teori agensi mendapat kritikan. Kritik tersebut disampaikan oleh Donaldson dan Davis dengan mengemukakan teori *stewardship*. Menurut teori ini, para manajer tertuju pada tujuan dan kepentingan organisasi, bukan termotivasi oleh tujuan-tujuan individu. Teori *stewardship* juga berasumsi bahwa hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Davis *et al.*: 1997). Perbedaan teori agensi dan *stewardship* menurut Donaldson dan Davis dalam Prodig *et al.* (2010) yaitu berada pada model perilaku manusia, yang berarti model berperilaku sosio-psikologis manusia itu menganut teori *stewardship*, sedangkan model berperilaku ekonomi manusia itu menganut teori agensi.

Optimalisasi berasal dari kata optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimal artinya terbaik atau tertinggi. Menurut Didik Tandika yang dikutip oleh Ilham, menyatakan bahwa optimalisasi identik dengan efektivitas selain efisiensi, yang merupakan ukuran suatu keberhasilan individu atau organisasi (Ilham, 2020). Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik dan jika tujuan optimasi tersebut adalah untuk meminimalkan biaya, maka itu tidak selalu menjadi keuntungan tertinggi yang dapat dicapai (Hotniar Siringoringo, 2005:4). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu kegiatan, upaya, atau proses yang mana diusahakan untuk hasil yang terbaik, yang merupakan ukuran keberhasilan individu atau organisasi. Optimasi dan efektivitas yang diharapkan oleh organisasi yaitu apabila *output* atau *outcome* (hasil) yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*). Sehingga dalam penelitian ini, bentuk optimalisasi yang dimaksud adalah optimalisasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan daya saing BUMDes di Desa Karanglewas Kidul. Hal ini sangat diperlukan agar tujuan utama adanya dana desa yang sudah dianggarkan pemerintah dapat tercapai.

Dana desa sangat berkaitan dengan teori NPM dan teori agensi. Hal ini dikarenakan bagaimana pelaksanaan NPM dan agensi itu sendiri yang efeknya yaitu adanya optimalisasi dari pengelolaan dana desa. Dana desa yang dimaksud adalah dana desa di Desa Karanglewas Kidul. Tentunya dalam menganggarkan anggaran dana desa, Pemerintah Desa Karanglewas Kidul memerlukan persetujuan dari masyarakat dalam musyawarah desa atau musdes atau musrenbangdes yang disahkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Namun, pada kenyataannya unsur masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam musdes atau musrenbangdes. Salah satu contohnya yaitu

pada saat pendirian BUMDes. Desa Karanglewas Kidul memiliki BUMDes atau badan usaha milik desa yang bernama Mitra Rejo Makmur. Dalam pendirian BUMDes Mitra Rejo Makmur diketahui tidak melibatkan semua unsur elemen masyarakat, tetapi hanya yang berkaitan dengan unit usaha BUMDesnya, yaitu penggemukan sapi. Namun, unit usaha BUMDes belum berjalan hingga kini per bulan Juli 2022) padahal sudah mendapatkan anggaran dana desa dari Pemerintah Desa Karanglewas Kidul. Oleh karena itu, pada penelitian ini membahas tentang bagaimana optimalisasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengungkap hal-hal yang menyebabkan BUMDes Mitra Rejo Makmur tidak berjalan unit usahanya hingga saat ini. Adapun sebagai pembanding yaitu BUMDes Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas ini mendapat persentase sebesar 78,5% dalam kategori efektivitas (Mahadika, 2021). Hasil tersebut diperoleh dari beberapa indikator yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti efektivitas BUMDes Desa Srowot. Indikator-indikator tersebut yaitu (Mahadika, 2021):

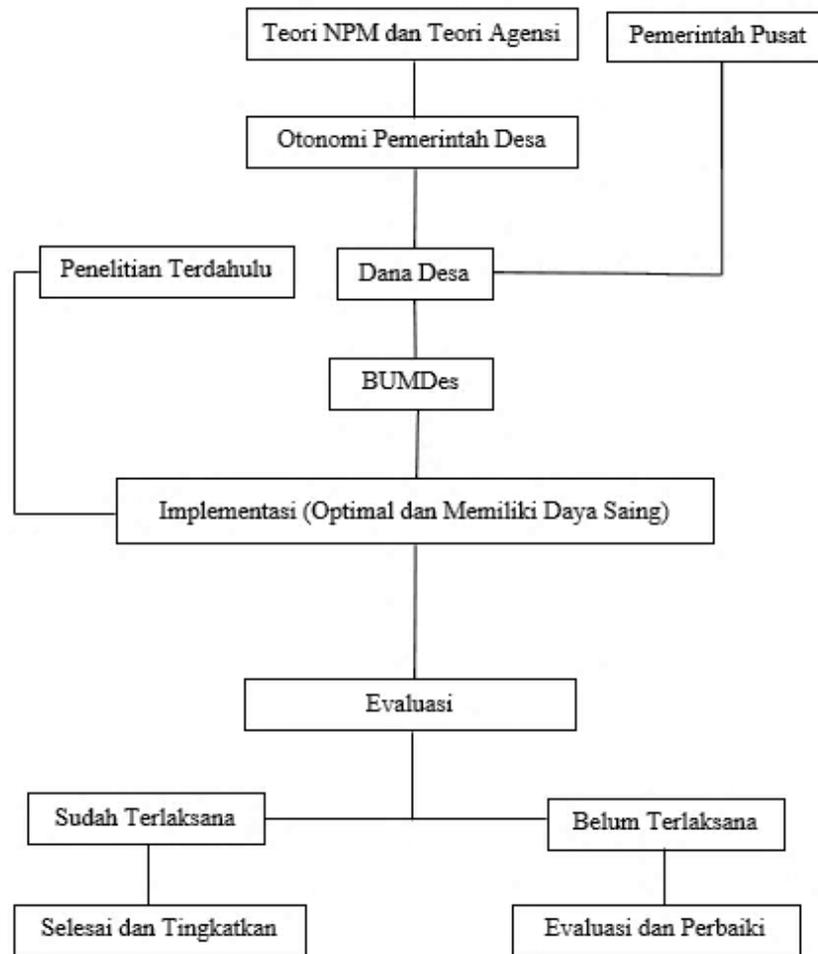
- Indikator pencapaian tujuan, yang mana BUMDes sudah melakukan programnya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Hal tersebut terbukti dari 14 responden, sebanyak 4 responden memilih kategori tinggi, sedangkan 8 responden memilih kategori sedang, dan sisanya memilih kategori rendah.
- Indikator kejelasan program yang dilakukan oleh pelaksana BUMDes di lapangan. Hal tersebut dibuktikan dengan sebanyak 3 responden memilih kategori tinggi, dan 10 responden memilih kategori sedang, sedangkan 1 orang lainnya memilih kategori rendah.
- Indikator dari sikap pelaksana yang mana sebanyak 10 responden memilih kategori sedang dan 4 responden memilih kategori rendah, namun tidak ada yang memilih kategori tinggi.
- Indikator ketersediaan sumber daya manusia yang mana sebanyak 10 responden memilih kategori tinggi, 1 responden memilih kategori sedang, dan 3 responden memilih kategori rendah.

Berdasarkan beberapa indikator yang menyebabkan BUMDes Desa Srowot termasuk dalam kategori BUMDes dengan tingkat keefektifan yang tinggi. Dengan demikian, hal tersebut dapat dijadikan sebagai pembanding bagi BUMDes Karanglewas Kidul dalam penelitian ini. Selain itu, model bisnis BUMDes Desa Srowot dapat dijadikan referensi untuk model bisnis dan cara pengelolaan BUMDes Mitra Rejo Makmur Desa Karanglewas Kidul.

2.2 Kerangka Pikiran

Teori NPM atau *New Public Management Theory* dan Teori Agensi merupakan dua teori yang saling berkesinambungan dan menjadi dasar untuk pelaksanaan program di sektor entitas publik. Kedua teori tersebut juga mendorong adanya keterbukaan terhadap publik. Sebagai contohnya yaitu adanya dana desa. Otonomi pemerintah desa yang melaksanakan Teori NPM dan Teori Agensi dalam mengelola dana desa, harus dimanfaatkan dengan optimal, agar tujuan dari diberikannya dana desa itu sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, otonomi pemerintah desa yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Karanglewas Kidul. Adapun dana desa itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menyejahterakan masyarakat desa, sehingga anggaran yang dikeluarkan haru tepat sasaran. Salah satunya untuk

pengembangan BUMDes atau badan usaha milik desa. Penelitian ini juga meneliti bagaimana implementasi dari berjalannya pengelolaan BUMDes, apakah sudah optimal dan memiliki daya saing, ataukah belum memiliki keduanya. Dengan berpedoman terhadap penelitian terdahulu dalam menentukan indikator pengelolaan BUMDes, maka kita bisa mengevaluasinya. Evaluasi tersebut apabila sudah sesuai implementasi pengelolaan BUMDesnya, maka pihak pengelola BUMDes wajib meningkatkan kembali pengelolaannya agar semakin meningkat. Tetapi jika belum sesuai dengan implementasi BUMDesnya, maka pihak pengelola BUMDes wajib melakukan perbaikan dalam pengelolaannya. Adapun gambar model kerangka penelitiannya yaitu sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2013:9) penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih menekankan pada makna. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dimaksud yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi dari pengelolaan dana desa yang

diperuntukkan bagi BUMDes Mitra Rejo Makmur Desa Karanglewas Kidul untuk meningkatkan daya saingnya. Lokasi penelitian ini berada di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada 18 April 2022 hingga tanggal 17 Juni 2022. Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara secara mendalam (*in-depth interviewing*) dengan enam informan, yaitu tiga orang pengelola dana desa, dua orang pengelola BUMDes, dan satu orang masyarakat dan dilakukan observasi langsung (*direct observation*). Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan dokumen-dokumen seperti Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021, Surat Keputusan Pendirian BUMDes, Laporan Realisasi Dana Desa, dan lain sebagainya. Kedua sumber data tersebut digunakan untuk memperkuat hasil penelitian untuk kevalidan data yang lebih baik. Setelah mendapatkan data-data penelitian, maka perlu direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau *flowchart* yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk menguji apakah data-data dalam penelitian ini valid atau tidak, maka dilakukan perpanjangan pengamatan, melakukan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, serta memakai bahan referensi.

4. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara secara mendalam (*in-depth interviewing*) dan observasi langsung (*direct observation*). Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen seperti laporan realisasi APBDes, dokumen pagu dana desa, profil desa, dan lain sebagainya. Namun, yang paling banyak datanya adalah dengan menggunakan metode wawancara dengan observasi dan dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung penelitian ini. Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Nama	L/P	Jabatan
1	Pengelola Dana Desa	Sisworo (Si)	L	1. Kepala Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas periode 2019-2024; 2. Penasehat BUMDes Mitra Rejo Makmur Desa Karanglewas Kidul Masa Bakti 2019-2024
2	Pengelola Dana Desa	Suwendo (Su)	L	Kepala Urusan Keuangan (Khususnya Dana Desa)
3	Pengelola Dana Desa	Slamet Mubarak (SM)	L	Sekretaris Desa Karanglewas Kidul
4	Pengelola BUMDes	Sahron, A.Md. (Sa)	L	1. Kadus II Desa Karanglewas Kidul 2. Anggota BUMDes
5	Pengelola BUMDes	Priyo Utomo (PU)	L	Ketua Pengurus BUMDes Mitra Rejo Makmur
6	Masyarakat	Darwono (D)	L	Ketua RW 1 Desa Karanglewas Kidul

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanglewas Kidul. Karanglewas Kidul adalah sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi desa ini terletak pada lima kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Banyumas, yaitu Kota Purwokerto. Adapun batas-batas wilayah administratif Desa Karanglewas Kidul yaitu:

- Selatan : Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas

- Timur : Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat
- Utara : Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Karanglewas
- Barat : Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas

Konteks penelitian ini yaitu untuk meneliti dan menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan daya saing BUMDes Mitra Rejo Makmur Desa Karanglewas Kidul. Adapun pagu dana desa di Desa Karanglewas Kidul yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Pagu Dana Desa Karanglewas Kidul

No.	Tahun	Jumlah (Dalam Rupiah)	Persentase Perubahan
1.	2015	289.096.027	0%
2.	2016	640.409.925	+121,52%
3.	2017	816.723.202	+27,53%
4.	2018	836.114.000	+2,37%
5.	2019	992.102.000	+18,65%
6.	2020	1.006.300.000	+1,43%
7.	2021	958.480.000	-4,75%
8.	2022	1.263.153.000	+31,78%
Jumlah		6.802.378.154	-

Dari data pagu dana desa di atas, dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2022 dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Karanglewas Kidul rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya. Anggaran dana desa tersebut tentunya dialokasikan untuk program-program desa seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pembangunan desa, membantu perekonomian warga seperti untuk UMKM dan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas umum di Desa Karanglewas Kidul. Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan tata cara serta aturan dari pemerintah juga dapat dikatakan sudah sangat baik. Selain itu pelaporan dana desa yang melalui sistem SisKeuDes atau Sistem Keuangan Desa juga turut berkontribusi dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dana desa.

Berdasarkan informasi dari informan wawancara untuk pengelola dana desa menyebutkan bahwa dana desa yang dikelola untuk BLT-DD adalah sebanyak 60% dari total dana desa yang diterima. Apabila tidak dilaksanakan atau jumlah persentasenya kurang, maka pemerintah desa dikenai sanksi yaitu berupa pemotongan anggaran dana desa di tahun selanjutnya. Selain itu, dana desa juga diperuntukkan untuk melaksanakan pembangunan desa seperti membangun jalan di desa, membangun irigasi, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan fasilitas desa. Menurut informan masyarakat juga menyampaikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karanglewas Kidul sudah sangat baik dalam hal pelayanan dan peningkatan fasilitas serta pembangunan di desa. Informan masyarakat tersebut juga menyebutkan bahwa informan tersebut sering dilibatkan dalam agenda musyawarah desa atau musdes dan musrenbangdes. Namun ada beberapa kendala dalam melaksanakan musdes atau musrenbangdes seperti tidak sempatnya bagi tiap-tiap RT untuk melaksanakan rapat RT bersama masyarakat di RT tersebut, sehingga aspirasi masyarakat tiap RTnya tidak tersampaikan. Namun, ketua RT setempat sudah memiliki pemikiran tersendiri untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai perwakilan dari RT masing-masing dan masyarakat juga setuju terhadap usulan tersebut setelah dilaksanakan musdes atau musrenbangdes. Namun, pada saat musyawarah untuk pendirian

BUMDes pada tahun 2019 banyak unsur masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pendirian BUMDes. Yang dilibatkan dalam pendirian BUMDes hanya sebagian perangkat desa dan kelompok peternak sapi saja karena unit usaha yang direncanakan untuk dikelola adalah unit usaha penggemukan sapi.

BUMDes di Desa Karanglewas Kidul yang selanjutnya disebut dengan BUMDes Mitra Rejo Makmur ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Karanglewas Kidul Nomor: 147/07/10/2019. Pada Surat Keputusan atau SK tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian BUMDes, penetapan susunan pengurus harian dan dewan pengawas BUMDes masa bakti 2019-2024, dan hal-hal yang selanjutnya akan diatur dikemudian hari. Adapun susunan pengurus harian dan dewan pengawas BUMDes Mitra Rejo Makmur Desa Karanglewas Kidul masa bakti 2019-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Susunan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas BUMDes Mitra Rejo Makmur Masa Bakti 2019-2024

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Unsur
1.	Sisworo	Banyumas, 24/10/1958	SLTP	Penasehat	Kepala Desa (Ex Oficio)
2.	Dwi Kurniawan, S.T.	Banyumas, 22/10/1974	S1	Ketua Dewan Pengawas	Tokoh Masyarakat
3.	Moh. Zaenul Rohman, S. Ag.	Banyumas, 31/08/1987	S1	Anggota Dewan Pengawas	Tokoh Agama
4.	Suhada	Banyumas, 10/10/1968	SLTA	Anggota Dewan Pengawas	Lembaga Desa
5.	Priyo Utomo	Banyumas, 13/11/1982	SLTA	Ketua Pengurus Harian	Tokoh Masyarakat
6.	Suharno	Jepara, 13/03/1969	SLTA	Sekretaris Pengurus Harian	Lembaga
7.	Tasrikin, S.Pt.	Banyumas, 14/11/1973	S1	Bendahara Pengurus Harian	Lembaga

BUMDes Mitra Rejo Makmur yang berdiri sejak tahun 2019 tersebut baru menerima dana desa dari pemerintah desa sejak tahun 2020. Adapun besarnya dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Jumlah Dana Desa Karanglewas Kidul Untuk BUMDes Mitra Rejo Makmur

No.	Tahun	Jumlah (Dalam Rupiah)	Status Pencairan
1.	2020	75.000.000	Sudah diberikan
2.	2021	100.000.000	Sudah diberikan
3.	2022	100.000.000	Belum diberikan hingga Juni 2022 karena menunggu pencairan tahap selanjutnya.

Adapun unit usaha BUMDes Mitra Rejo Makmur adalah unit usaha penggemukan sapi yang masuk dalam bidang peternakan. Adapun caranya yaitu pengelola BUMDes membeli sapi jantan yang masih kecil atau berkisar umur 6-8 bulan untuk kemudian dipelihara di kandang sapi yang sudah disediakan selama 6 bulan. Barulah hingga menjelang Hari Raya *Iduladha* dijual kepada takmir-takmir masjid di sekitar desa. Menurut Informan Sa, kebanyakan sapi-sapi di Desa Karanglewas Kidul laku terjual oleh pembeli yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut dikarenakan takmir-takmir masjid di Desa Karanglewas Kidul menurutnya tidak memiliki dana yang cukup untuk

membeli sapi-sapi tersebut. Sebagai contoh harga jual yang dipatok biasanya berkisar antara 24,5 juta hingga 26,5 juta, namun ditawar dengan harga berkisar 21 juta. Padahal pembelian awal sapi jantan yang masih kecil berkisar hingga Rp16.000.000,-. Oleh karenanya apabila terjual dengan harga yang berkisar Rp21.000.000,- tersebut masih tergolong rendah, karena keuntungan yang diperoleh sedikit dan harus dipotong dengan biaya-biaya operasional selama proses penggemukan sapi.

Namun, unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Mitra Rejo Makmur hingga kini (per bulan Juli 2022) belum berjalan. Sapi-sapi yang selama ini dijadikan patokan untuk unit usaha BUMDes adalah sapi ternak milik warga sekitar dan ada juga yang milik peternak sapi sendiri. Untuk sapi yang milik BUMDes Mitra Rejo Makmur belum ada hingga kini (per bulan Juli 2022). Padahal bila ditinjau dari *skill* dari para peternak sapi itu sudah sangat mumpuni karena sudah berpengalaman selama puluhan tahun dan bermatapencaharian sebagai peternak dan petani. Adapun rencana untuk memulai unit usaha tersebut berkisar bulan Januari 2023. Hal-hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- Adanya pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia sejak tahun 2020 yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor perekonomian.
- Adanya ketidaksepahaman antara salah satu pengelola BUMDes dengan salah satu pengelola dana desa, yang menyebabkan unit usaha BUMDes belum berjalan hingga kini.
- Daya beli masyarakat dalam desa yang rendah, ditambah tidak adanya media sosial untuk mempromosikan sapi.
- Kurangnya dukungan dari pemerintah desa terhadap pengelolaan dan pelatihan yang berkaitan dengan penggemukan sapi kepada kelompok peternak sapi. Namun kelompok ternak sapi tersebut pernah mendapat pelatihan, penyuluhan, dan pemantauan hewan ternak sejak tahun 2018 hingga bulan Februari 2022 dari Dinas Peternakan Banyumas.
- Kandang untuk penggemukan sapi belum selesai pembangunannya. Hal tersebut dikarenakan adanya *refocussing* anggaran dana desa, yang semula untuk pembangunan desa diubah yang sebagian besarnya untuk penanggulangan Covid-19. Sehingga kini baru dilanjutkan lagi dan ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2022.
- Terdapat inisiatif dari pengelola BUMDes untuk mengelola uang dari dana desa tersebut untuk dikembangkan usaha lainnya seperti jualan masker medis untuk mencegah Covid-19 pada tahun 2021, namun tidak adanya kelanjutan.
- Kurangnya aspirasi dan keterlibatan dari masyarakat saat pendirian BUMDes dan tidak adanya perencanaan yang matang saat menentukan unit usaha ketika musyawarah untuk pendirian BUMDes sedang berlangsung.

Dari beberapa permasalahan tersebut menyebabkan dana desa yang diberikan untuk BUMDes Mitra Rejo Makmur tidak optimal yang berimbas pada BUMDesnya tidak memiliki daya saing karena unit usahanya belum berjalan. Pemerintah Desa Karanglewas Kidul selaku pengelola dana desa dan pengelola BUMDes Mitra Rejo Makmur berharap usaha penggemukan sapi dapat segera

berjalan dan memulai usaha tersebut dengan 20 ekor sapi jantan. Pengelola BUMDes lebih memilih sapi jantan dikarenakan lebih produktif daripada sapi betina. Sapi betina pernah dipelihara oleh peternak sapi tersebut, tetapi tidak lama kemudian sapi betina tersebut mati dan tidak diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerugian berulang karena kematian, berkaca pada hal tersebut maka pengelola BUMDes tidak memelihara sapi betina. Harapannya dari 20 ekor sapi jantan tersebut dapat bertambah jumlah sapi seiring berjalannya waktu. Karena menurut keterangan dari informan-informan tersebut menyebutkan bahwa dengan BUMDes yang menjadi ternak unggulan di desa tersebut, maka dapat memberikan *passive income* bagi masyarakat yang mau menitipkan sapi ke BUMDes dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu prospek untuk penggemukan sapi ini dalam jangka panjang, mengingat kompetitor atau desa yang mengadakan penggemukan sapi atau beternak sapi belum ada di sekitar Desa Karanglewas Kidul.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa masalah pada pengelolaan dana desa dan pengelolaan BUMDes di Desa Karanglewas Kidul. Namun, yang paling utama adalah pengelolaan BUMDesnya yaitu BUMDes Mitra Rejo Makmur. Hal ini disebabkan karena BUMDes sudah mendapat anggaran dana desa sebesar Rp175.000.000,- dan akan menerima sebesar Rp100.000.000,- pada tahun 2022. Padahal menurut penulis, seharusnya modal berapapun sudah menjadi aset yang bisa dikelola untuk usaha dan menghasilkan keuntungan walaupun sedikit. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pengelola BUMDes sehingga tidak berjalan dengan optimal dan tidak memiliki daya saing. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Karanglewas Kidul dan pengelola BUMDes harus bersinergi bersama dalam mendukung unit usaha BUMDes Mitra Rejo Makmur dan mengatasi kekurangan serta permasalahan di dalamnya agar memiliki daya saing dengan BUMDes di desa-desa lainnya. Selain itu, Pemerintah Desa Karanglewas Kidul dalam melaksanakan musyawarah desa atau musdes atau musrenbangdes untuk pendirian BUMDes, hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga, baik itu pelayanan desa, pembangunan desa, maupun pelaksanaan unit usaha BUMDes dapat berjalan maksimal, agar tujuan dari adanya dana desa dan BUMDes dapat tercapai. Adapun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dalam mengambil data maupun dalam penyampaian penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Kritik dan saran dapat disampaikan ke *e-mail* penulis yang tertera.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada segenap tim MBKM *Research* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman yang telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program Peneliti Muda bagi penulis, sehingga penulisan jurnal ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Karanglewas Kidul dan pengelola BUMDes Mitra Rejo Makmur beserta masyarakat yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Daftar Pustaka

- detikcom, T. (2021). *detiktravel*. Retrieved Maret 10, 2022, from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://travel.detik.com/travel-news/d-5766046/luas-indonesia-berapa-ini-jawabannya/amp&ved=2ahUKEwiwyePs1bv2AhWdILcAHYeaA3AQFnoECAQOBQ&usg=AOvVaw1UdeA09Hu5IJTk03GUrVRk>
- Ilham. (2020). Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1).
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*.
- Mahadika, G. (2021). *Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Di Desa Srowot Kecamatan Kalibagor)*. Skripsi Thesis: Universitas Jenderal Soedirman.
- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.